



KEPAHIANG

KAMIS, 2 FEBRUARI 2023

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Empat Parpol Belum Serahkan LPj Banpol

Kesbangpol Menunggu

KEPAHIANG - Dari 10 Partai Politik (Parpol) yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kepahiang, empat diantaranya belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2022 lalu. Adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Sedangkan enam partai yang sudah menyerahkan LPj kepada Kesbangpol, Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor 2 tahun 2015, menyatakan bahwa parpol diwajibkan melaporkan LPj penggunaan anggaran Banpol, setiap satu tahun sekali. Paling lama satu bulan setelah tahun ang-

garan berakhir.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang, Musi Dayan, S.Si mengatakan, LPj empat parpol ditunggu sebelum BPK RI Perwakilan Bengkulu meminta LPj tersebut, untuk dilakukan audit.

"Tidak ada batas waktu yang mengikat untuk menyerahkan LPj. Jika BPK RI memintanya, parpol wajib menyediakan," ujar Musi, kemarin (1/2).

Namun demikian, ia meminta empat parpol yang belum menyerahkan LPj agar segera mungkin. "Kita masih menunggu instruksi dari BPK RI kapan LPj akan diaudit. Jadi sebaiknya empat parpol itu menyerahkan LPj sebelum turunnnya instruksi BPK," sampainya.

Selain itu, tak adanya LPj dari parpol tentu akan merugikan parpol bersangkutan. Karena pencairan banpol tahun ini, baru bisa dilakukan bila LPj penggunaan banpol tahun 2022 telah diserahkan ke Kesbangpol Kepahiang.

Untuk Banpol di Kabupaten Kepahiang, hitungannya Rp 15 ribu per satu suara pemilih sah. Artinya besaran banpol yang didapatkan masing-masing parpol akan menyesuaikan perolehan suara pada Pemilu legislatif tahun 2019. (eng)